

EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Muhammad Yudi Saputra¹, Elly Karmeli^{2*}, Nining Fitriani³
¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: ellykarmeli@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 12 Desember 2022 Revised: 24 Desember 2022 Published: 31 Desember 2022	<i>This study aims to know the performance of regional financial of Sumbawa District in 2017-2021. The type of this study was descriptive study. The data used was quantitative namely Regional Government Budget (RGB) of Sumbawa District from 2017-2021. The data used was secondary data. The methods used to collect data were through literature study. The data analysis technique was the RGB performance analysis technique which is assessed through three measures, namely the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial effectiveness and the ratio of regional financial efficiency. The results of the study showed that financial independence of Sumbawa in 2017-2021 was in the Very Low category with Instructive relationship pattern, then the financial effectiveness of Sumbawa District in 2017-2021 was in the Very Effective category and financial efficiency of Sumbawa District in 2017-2021 was in the Inefficient category. The Sumbawa District Government has not been able to implement regional autonomy, by reducing dependence on the central government. Therefore, it is needed the act of government to reduce dependence on external funding sources by optimizing the existing regional potential so that RGB can increase so that regional dependence on budgets from the Central and Provincial Governments can be reduced.</i>
Keywords Regional Financial Performance; Independence Ratio; Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio.	

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya.

Bertambahnya kemiskinan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, ketidakmerataan pembangunan dan masalah pembangunan sumber daya manusia merupakan permasalahan lokal pemerintah daerah di Indonesia (Yasin, *et al*, 2020). Pencapaian rencana pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan, administrasi dan pembangunan dapat terwujud dengan baik bilamana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pengelolaan sumber daya keuangan yang tertuang dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan baik dalam ekonomi, sosial maupun politik (Susanto, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan memiliki peran untuk memberikan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Suatu daerah harus lebih efisien dan efektif dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah secara akuntabilitas dan berkeadilan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Wahyudi, 2018).

Untuk mempermudah memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan daerah, dapat dibantu dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019).

Analisis rasio keuangan yaitu suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Siregar, 2020). Analisis rasio keuangan pendapatan dan belanja daerah dapat menggunakan rasio keuangan berupa rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemampuan keuangan daerah berupa *shareration* dan *growth ratio* (Goenawan dan Soedarsa, 2020).

Menurut Yoda dan Febriani (2019), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Sedangkan menurut Arpani dan Halmawati (2020), kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.

Sedangkan efektivitas adalah suatu kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah untuk menjalankan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang tepat, untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Menurut Handoko (2016), efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar.

Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar dilihat dari perbandingan output berupa hasil, produktifitas, performance, dibandingkan dengan input berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Menurut Halim (2017), efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Ukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran).

Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibandingkan masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, disebut efisiensi apabila dapat meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan.

Pada pemerintahan Kabupaten Sumbawa, kinerja keuangan yang ditinjau dari rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah sangat penting untuk dievaluasi karena ketiga variabel ini yang menentukan baik atau buruknya keuangan suatu daerah, dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan semua variabel tersebut. Melalui evaluasi kinerja keuangan, pemerintah

daerah Kabupaten Sumbawa dapat memperbaiki kinerja pemerintah yang bertujuan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi (Fitriyani, *et al*, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2017), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki data kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Pendekatan deskriptif pada penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui nilai variabel itu sendiri, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 yang diukur menggunakan rasio keuangan meliputi rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono (2019). Data kuantitatif penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Sumbawa.

Dari diperoleh dari sumber sekunder. Menurut Sugiarto (2017), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dan literatur literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan diperoleh dengan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2017) teknik dokumentasi merupakan teknik mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu dengan menghitung data keuangan yang terdapat dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang diperoleh dari BPKAD. Analisis kinerja APBD dilakukan dalam beberapa tahapan berikut ini (Mahmudi, 2019), yaitu:

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dinilai berdasarkan kriteria berikut ini.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	< 25	Instruktif
Rendah	25,1 – 50	Konsultatif
Sedang	50,1 – 75	Partisipatif
Tinggi	75,1 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2017.

2. Analisis Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Analisis rasio efektivitas keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas keuangan daerah dapat dinilai berdasarkan kriteria berikut ini.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Rasio (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019.

3. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dinilai berdasarkan kriteria berikut ini.

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Rasio (%)	Kriteria
< 60	Sangat Efisien
60 – 80	Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
> 100	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengukur kinerja APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021. Analisis kinerja APBD Kabupaten Sumbawa dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, meliputi analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio ini juga menggambarkan keuntungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2017	248.865.991.558,50	1.684.200.793.962,50	14,78	Rendah sekali
2018	145.212.584.267,00	1.630.984.783.039,00	8,90	Rendah sekali
2019	173.606.895.451,89	1.827.810.328.049,89	9,50	Rendah sekali
2020	163.287.089.069,97	1.604.614.833.927,97	10,18	Rendah sekali
2021	192.702.474.058,00	1.668.351.880.071,93	11,55	Rendah sekali

Sumber: APBD Kabupaten Sumbawa (diolah), 2022.

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 memiliki tingkat kemandirian yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Rendahnya rasio kemandirian keuangan disebabkan PAD Kabupaten Sumbawa masih rendah dibawah pendapatan transfer. PAD Kabupaten Sumbawa tidak bisa diandalkan untuk melayani masyarakat sehingga pemerintah masih mengandalkan pendapatan transfer. Hal ini menyiratkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum mampu melaksanakan otonomi daerah, dengan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Intervensi pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam menjalankan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa.

2. Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sumbawa yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2017	248.865.991.558,50	139.116.201.806,50	178,89	Sangat Efektif
2018	145.212.584.267,00	144.011.520.890,00	100,83	Sangat Efektif
2019	173.606.895.451,89	148.384.813.135,00	117,00	Sangat Efektif
2020	171.830.139.671,00	163.287.089.069,97	105,23	Sangat Efektif
2021	192.702.474.058,00	174.492.779.208,00	110,44	Sangat Efektif

Sumber: APBD Kabupaten Sumbawa (diolah), 2022.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuasi, dimana terjadi kenaikan dan penurunan antara rasio efektivitas keuangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Efikasi keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 tergolong Sangat Efektif karena skor yang diperoleh lebih besar dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menyelidiki dan mengendalikan PAD. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dapat secara optimal memanfaatkan sumber potensial daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

3. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan pembentukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan minimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Table 6. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2017	1.830.671.897.441,58	1.684.200.793.962,50	108,70	Tidak efisien
2018	1.773.892.233.379,61	1.630.984.783.039,00	108,76	Tidak efisien
2019	1.917.247.255.587,53	1.827.810.328.049,89	104,89	Tidak efisien
2020	1.638.810.494.635,14	1.604.614.833.927,97	102,13	Tidak efisien
2021	1.726.955.311.741,64	1.668.351.880.071,93	103,51	Tidak efisien

Sumber: APBD Kabupaten Sumbawa (diolah), 2022.

Tabel 6, menunjukkan efisiensi belanja daerah di Kabupaten Sumbawa bervariasi dari tahun ke tahun. Tingkat efisiensi belanja di Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 bernilai lebih besar dari 100% (>100%) sehingga berada pada kategori Tidak Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa belum efektif mengelola belanja daerah sehingga terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah.

Pembahasan

Pada penelitian ini, kinerja APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 yang dinilai melalui tiga ukuran, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Menurut Awani dan Hariani (2021), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Rendahnya rasio kemandirian keuangan disebabkan PAD Kabupaten Sumbawa masih rendah dibawah pendapatan transfer. PAD Kabupaten Sumbawa tidak bisa diandalkan untuk melayani masyarakat sehingga pemerintah masih mengandalkan pendapatan transfer. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa belum mampu melaksanakan otonomi daerah, dengan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Intervensi pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam menjalankan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa.

Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar PAD dapat meningkat sehingga ketergantungan daerah terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dapat berkurang.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Menurut Hasnita (2021), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuasi, dimana terjadi kenaikan dan penurunan antara rasio efektivitas keuangan tahun 2017-2021. Efikasi keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 tergolong Sangat Efektif, hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa sangat efektif dalam menyelidiki dan mengendalikan PAD sehingga dapat secara optimal memanfaatkan sumber potensial daerah yang ada untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Menurut Drastiana dan Himmati (2021), efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat efisiensi keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori Tidak Efisien. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa belum efektif dalam mengelola belanja daerah sehingga terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa diharapkan agar dapat menentukan prioritas pada pos pengeluaran belanja pemerintah, pemerintah harus memilah-milah kebutuhan yang memang menjadi rutin dan dibutuhkan dalam pemerintahan sehingga tidak terjadi pemborosan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat memenuhi kriteria efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap saluran pemasaran udang hasil tambak tradisional di daerah penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum mampu melaksanakan otonomi daerah, dengan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Tingkat efektivitas keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori Sangat Efektif. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dapat secara optimal memanfaatkan sumber potensial daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
3. Tingkat efisiensi keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021 berada pada kategori Tidak Efisien. Kabupaten Sumbawa belum efektif mengelola belanja daerah sehingga terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
 - a. Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar PAD dapat meningkat sehingga ketergantungan daerah terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dapat berkurang.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa diharapkan agar dapat menentukan prioritas pada pos pengeluaran belanja pemerintah, pemerintah harus memilih kebutuhan yang memang menjadi rutin dan dibutuhkan dalam pemerintahan sehingga tidak terjadi pemborosan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat memenuhi kriteria efisien.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan lebih memaksimalkan fungsi situs *website* yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Pembangunan daerah bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah saja, namun peran serta partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewajibannya, hal itu penting mengingat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana yang cukup besar, dan penerimaan pajak dan retribusi merupakan sumber utama pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arpani, W.N., & Halmawati (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol. 2(2): 2373-2390.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3(2): 95-102.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, Vol. 1(1): 51-65.
- Fitriyani, I., Fietroh, M.N., & Asmini. (2020). Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1(3): 173-180.
- Goenawan, H., & Soedarsa. (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 11(1): 74-91.

- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T.H. (2016). *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2(8): 1320-1329.
- Jhingan, M.L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, penerjemah: D. Guritno*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Siregar, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, Vol. 9(1): 1-19.
- Sugianto, E. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1): 770-778.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi*, Vol. 7(1): 81-92.
- Wahyudi, M. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, Vol. 2(2): 25–32.
- Yasin, M., Irwan, M., & Wahyunadi. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. *EKONOBIS*, Vol. 6(2): 134-164.
- Yoda, T.C., & Febriani, R. (2019). Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Antarkota di Sumatera Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 3(4): 369-375.